

CITIZEN JOURNALISM SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI PEMBANGUNAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH

CITIZEN JOURNALISM FOR DEVELOPMENT OF PARTICIPATION MEDIA GOVERNMENT ACCOUNTABILITY

Sri Hastjarjo

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126, Indonesia, Telp.: 0271- 663483 / 0271-648379

Fax : 0271-648379

E-mail: sri.hastjarjo@gmail.com

Naskah diterima tanggal 1 September 2015, direvisi tanggal 16 Oktober 2015, disetujui tanggal 12 November 2015

Abstract

One of the indicators of a democratic governance is the opportunity for its citizen to participate in the governmental processes, from the planning, implementation, and controlling/evaluation stages. One of the important aspect is the accountability of the government to its citizen—which require a two-way street or reciprocal information transparency. The development of citizen journalism—facilitated by the communication and information technology (especially online media and social media) has enabled citizen to practice journalism activities to report the public issues which are uncovered by the mainstream mass media. This research was an action research, using qualitative approaches at the Regency of Karanganyar and the City of Surakarta. The data were collected using interviews, FGDs, and observation techniques, involving NGO's activist in the area of public policy. This research finds that citizen journalism has a potential to be used as a monitoring mechanism on the governmental processes and as a media to disseminate the monitoring results in the reports that comply to the journalism principles—which in turn will help in developing the government accountability.

Keywords: *Citizen Journalism, Government Accountability, Citizen Participation*

Abstrak

Salah satu indikator sistem pemerintahan yang demokratis dan propublik adalah terbukanya kesempatan bagi partisipasi warga negara di dalam proses pengelolaan pemerintahan, sejak perencanaan, implementasi, sampai dengan pengawasan dan evaluasi. Dalam kaitan itu, aspek yang penting adalah akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada warga negara; di mana mensyaratkan transparansi informasi yang bersifat dua arah atau timbal balik. Perkembangan *citizen journalism* yang difasilitasi TIK (khususnya media online dan media sosial) memungkinkan warga negara melakukan aktivitas jurnalistik mengangkat isu-isu publik yang tidak diliput media massa *mainstream*. Riset ini merupakan riset aksi menggunakan metode kualitatif dengan lokasi di kabupaten Karanganyar dan kota Surakarta. Pengumpulan data menggunakan wawancara, FGD, dan observasi yang melibatkan aktivis LSM di bidang kebijakan publik. Hasilnya, *citizen journalism* memiliki potensi untuk digunakan dalam melakukan monitoring proses pemerintahan dan mendiseminasikan hasil monitoring itu dalam format informasi yang memenuhi kaidah jurnalistik—yang pada akhirnya akan membangun akuntabilitas pengelolaan pemerintahan.

Kata kunci: *Citizen Journalism, Akuntabilitas Pemerintah, Partisipasi Warga Negara*

PENDAHULUAN

Salah satu indikator pemerintahan yang demokratis adalah adanya keterlibatan aktif dari warga negara di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi pemerintahannya, ada tuntutan untuk memenuhi akuntabilitas sosial di dalam menjalankan tanggung jawab mengelola negara. McGee dan Gaventa (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas sosial berhasil meningkatkan keterlibatan warga negara (publik) dalam melakukan kontrol kepada jalannya pemerintahan, sehingga mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Manfaat positif dari akuntabilitas publik meliputi: (1) peningkatan responsivitas pemerintah atau institusi; (2) menurunkan korupsi; (3) membangun ruang demokratis baru untuk pelibatan masyarakat; (4) pemberdayaan suara lokal; dan (5) penggunaan anggaran dan penyaluran layanan publik yang lebih baik.

Ciri khas dari akuntabilitas sosial adalah adanya keterlibatan aktif kelompok masyarakat atau warga negara (*citizen*) untuk memberikan usulan bagi kebijakan publik, melakukan monitoring implementasi kebijakan publik, meminta penjelasan kepada implementator kebijakan publik, dan melakukan advokasi terhadap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Akuntabilitas sosial mencerminkan relasi kekuasaan antara penguasa (pemerintah) dengan warga negara; dengan demikian akuntabilitas sosial merupakan bagian dari kerangka hubungan pengelolaan pemerintahan yang demokratis.

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam membangun akuntabilitas sosial dan keterlibatan warga negara adalah adanya transparansi informasi publik. Derajat keterbukaan akses informasi merupakan salah satu pilar yang menopang akuntabilitas sosial, di samping tiga pilar yang lain, yaitu derajat kemauan politik pemerintah untuk melibatakan warga negara, derajat kapabilitas kelompok warga masyarakat, dan konteks lingkungan dan budaya (Yang dan Callahan, 2005; Peruzzotti dan Smulovit, 2006; ENZA-EAP, 2012).

Terkait dengan keterbukaan informasi publik, diperlukan juga kapasitas warga untuk melakukan akses, memahami, dan memanfaatkan informasi publik dengan semestinya—kapasitas yang diwakili dengan istilah literasi informasi publik (*public information literacy*). Literasi informasi publik memiliki berbagai kompetensi untuk mencari, mengakses, mengkritisi, dan pada akhirnya memproduksi dan melakukan diseminasi informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media online dan media sosial, menjadi sangat berarti bagi warga sebagai sumber daya di dalam keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan negara. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mencari dan mengakses informasi publik, namun juga untuk melakukan publikasi temuan, opini, dan advokasi dari kelompok warga kepada pemerintah maupun kepada publik secara luas, terkait isu tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan—khususnya pelayanan publik. Serangkaian aktivitas yang terbingkai dalam apa yang disebut sebagai jurnalisme warga (*citizen journalism*).

Tulisan ini berusaha menjelaskan pokok-pokok penting temuan yang diperoleh di lapangan dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di kabupaten Karanganyar dan kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Ada kegiatan penelitian yang telah dilakukan berupa penelitian *multiyears* (tahun 2012-2013) dengan judul “Strategi Pengembangan *Public Policy Literacy* untuk Mendorong Kebijakan Pembangunan Daerah yang Propublik”; sedangkan kegiatan pengabdian masyarakatnya dilakukan pada tahun 2014 dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis *Citizen Journalism*”. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut dibiayai oleh dana DIPA BLU LPPM Universitas Sebelas Maret tahun 2012, 2013, dan 2014.

Sejak tahun 2000-an, sebuah paradigma baru dalam bidang pemerintahan (*governance*)

mulai dikembangkan; di mana paradigma yang kemudian disebut sebagai *human governance* ini memberi tekanan kepada terciptanya keseimbangan pembangunan kualitas manusia sebagai warga negara dari dimensi ekonomi, keadilan, nilai demokrasi, dan kesadaran sebagai *citizen*. Konsep *human governance* ini mencakup gagasan-gagasan utama, yaitu *good political governance*, *good economic governance*, dan *good civic governance* (Weiss, 2000). Paradigma *human governance* mencakup pengembangan struktur dan proses yang mendukung terciptanya pemerintahan yang memiliki karakteristik: partisipatif, responsif, akuntabel, yang dijalankan dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif, nondiskriminatif, dan seimbang.

Pada dimensi *good civic government*, salah satu karakteristik yang mendapat penekanan adalah terjadinya pemberdayaan masyarakat (*citizen*) dengan informasi (publik) yang akurat. Sedangkan pada dimensi *good political governance*, poin penting yang harus mendapat perhatian adalah desentralisasi kekuasaan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dan transparansi para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan publik (Haq et al., 1999).

Lahirnya pendekatan akuntabilitas sosial tidak lepas dari adanya keterbatasan mekanisme akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal yang menempatkan lembaga politik dan lembaga pemerintah sebagai ‘*chain of accountability*’, aktor kunci pemegang monopoli akuntabilitas publik (Ungar, 2009). Akuntabilitas sosial adalah akuntabilitas horisontal yang digerakkan oleh masyarakat, untuk menggerakkan pelaku kebijakan supaya menjalankan apa yang tertulis di aturan untuk dipertanggungjawabkan langsung kepada warga biasa, atau mendorong nilai-nilai mandat publik dapat dirumuskan dalam aturan yang menjadi penangangan pejabat publik, atau setidaknya tidaknya diikuti dalam praktik (Goetz dan Jenkins, 2005). Tindakan aktif kelompok warga mengupayakan akuntabilitas publik ini ada yang menyebut sebagai *informal institutions*

of accountability, yaitu memperjuangkan aturan dan norma yang tidak secara resmi atau berotoritas untuk meminta pejabat publik akuntabel melayani kepentingan kelompok warga (Tsai, 2007).

Pengembangan *good civic governance* memerlukan partisipasi warga negara yang *literate* terhadap isu-isu publik dan mekanisme proses kebijakan publik. Kualitas partisipasi warga negara yang tinggi akan mendorong tercapainya pembuatan kebijakan publik maupun program kegiatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berpihak kepada kelompok-kelompok yang rentan mengalami ketidakadilan dan marginalisasi.

Fung (2006) mengidentifikasi beberapa dimensi yang terkait dalam usaha menghasilkan keterlibatan warga yang berkualitas, yaitu: (1) *siapa yang berpartisipasi*; dimensi pertama ini melihat luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan aspirasinya untuk memengaruhi sebuah kebijakan; (2) *bagaimana partisipan saling berkomunikasi dan membuat keputusan bersama*; dimensi kedua adalah dengan melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas; dan (3) *bagaimana hasil diskusi terkait/ terhubung dengan aksi kebijakan atau aksi publik*; dimensi ketiga adalah dengan melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan produk kebijakan yang dihasilkan dengan persoalan riil yang berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi dan partisipasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas.

Keterbukaan dan transparansi dapat dipahami sebagai “*the availability and accessibility of relevant information about the functioning of the polity*” (Gerring & Thacker, 2004). Dari definisi tersebut dapat dilihat adanya dua komponen penting yang membangun transparansi, yaitu: (1) ketersediaan (*availability*)

informasi publik; dan (2) aksesibilitas informasi publik. Dua komponen ini terkait erat dengan isu *content* (isi) dan isu metode atau prosedur untuk mendapatkan *content* yang relevan dengan kepentingan publik. Transparansi menjadi syarat utama bagi akuntabilitas lembaga publik, sebab “kegelapan” informasi adalah lahan yang subur bagi tumbuhnya inefisiensi dan korupsi. Diperlukan transparansi, kondisi di mana publik bisa memperoleh informasi yang memadai mengenai aktivitas-aktivitas dan standar-standar yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik.

Dimensi Ketersediaan Informasi oleh Lembaga Publik; informasi pelayanan publik yang disediakan harus dapat diakses oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang, sehingga penyediaan informasi pelayanan publik itu diberikan dengan memperhatikan dua aspek: (1) media dan pesan: informasi disajikan dalam berbagai format lisan, tulisan Latin, huruf braille, bahasa gambar dan/ atau bahasa lokal; (2) informasi disajikan secara manual ataupun elektronik. Sedangkan dalam hal isi (*content*), informasi publik yang disediakan harus memfasilitasi warga mengetahui dengan pasti apa dan dengan standar kualitas layanan seperti apa yang akan mereka dapatkan.

Dimensi Kapabilitas Warga untuk Memperoleh Informasi Pelayanan Publik; ketersediaan informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga publik tidak secara serta merta menjamin bahwa warga akan dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi itu. Melihat kepada dimensi warga dalam kaitannya dengan ketersediaan informasi publik, sangat krusial untuk membicarakan kapabilitas warga dalam mengelola informasi, yang biasa dikenal dengan kemampuan melek informasi atau *information literacy*.

Zurkowski (1974) dalam Gerring & Thacker (2004) mendefinisikan *information literacy* sebagai “*techniques and skills* kemampuan dan keterampilan untuk memanfaatkan berbagai piranti informasi dan sumber-sumber informasi untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Pada tahun

1989, laporan yang disusun oleh *American Library Association’s Presidential Committee on Information Literacy* memberikan definisi melek informasi sebagai “*ability to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information*” (ALA, 1989), atau kemampuan untuk mengetahui kapan suatu informasi itu diperlukan dan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut. Organisasi ini secara eksplisit juga menyatakan bahwa *information literacy* merupakan salah satu skill yang diperlukan di dalam proses belajar seumur hidup, dan menjadi prasyarat bagi terbentuknya warga negara yang cerdas dan sejahtera (*informed and prosperous citizen*).

American Library Association (ALA) memberikan semacam panduan mengenai kemampuan-kemampuan yang tercakup di dalam *information literacy*, di antaranya adalah: menentukan jenis dan cakupan informasi yang diperlukan, mengakses informasi tersebut secara efektif dan efisien, mengevaluasi informasi maupun sumbernya secara kritis, menggabungkan informasi yang terseleksi menjadi pengetahuan, menggunakan informasi secara efektif untuk maksud tertentu, memahami nilai ekonomi, hukum, maupun sosial, sekitar pemustakaan informasi dan aksesnya secara etis dan legal.

Manifestasi dari literasi informasi tingkat lanjut memberi penekanan utama kepada kemampuan untuk melaporkan (*reporting*) isu-isu yang penting diketahui oleh publik; di mana pelaporan itu sendiri harus didukung dengan kompetensi-kompetensi lainnya, yaitu pencarian informasi dan daya kritis atas informasi. Ketika konsep pelaporan ini dikaitkan dengan posisi warga masyarakat sebagai *citizen*, maka dikenal apa yang disebut sebagai jurnalisme warga (*citizen journalism*).

Bowman dan Willis (2003) mendefinisikan *citizen journalism* sebagai “*...the act of citizens playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information*”. Warga yang bertindak

sebagai jurnalis disebut sebagai *netizen*, yaitu sekelompok warga yang aktif memberikan kontribusi berita—dengan media utama adalah media online (Wood dan Smith, 2005). Jurnalisme warga sendiri mulai berkembang sekitar tahun 1988, sebagai reaksi atas tingkat ketidakpercayaan dan sinisme publik terhadap media dan politik di Amerika Serikat. Mekanisme kerja media massa, yang telah menjadi industri, dipandang lebih memberi tekanan kepada isu-isu yang memiliki daya jual ketimbang kepada isu-isu yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga masyarakat.

Aktivitas utama jurnalisme warga adalah memproduksi berita, terutama dalam situasi di mana media massa *mainstream* tidak melakukannya. Dalam situasi seperti ini, peran jurnalisme warga menjadi penting dalam penyebaran informasi, khususnya informasi yang diabaikan atau bahkan sengaja ditutupi oleh media tradisional (Moyo, 2009). Selain melaporkan peristiwa, karakteristik dari jurnalisme warga adalah memberikan komentar atas informasi peristiwa yang disebarluaskan (Zuckerman, 2009). Banda (2010) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara jurnalisme warga dan proses demokratisasi serta pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat.

Apabila ditarik benang merah dari kajian pustaka yang telah dilakukan di atas, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: (1) pemerintahan yang demokratis dan propublik memiliki ciri transparan, akuntabel, dan melibatkan warganya secara aktif dalam proses pemerintahan; (2) keterlibatan warga negara mensyaratkan kompetensi tertentu, khususnya literasi informasi, yang termanifestasikan dalam aktivitas jurnalisme warga. Dengan demikian, jurnalisme warga menjadi instrumental di dalam memberdayakan kapasitas warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan yang demokratis, dengan menjalankan fungsi kontrol atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait isu-isu publik yang bisa jadi terlewat dari liputan media massa *mainstream*.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian riset aksi

(*action research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) memetakan isu-isu penting terkait literasi informasi publik dan keterlibatan warga dalam proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan pemerintahan; dan (2) membangun model pengembangan literasi informasi publik yang dikemas dalam aktivitas jurnalisme warga.

Lokasi penelitian adalah di kabupaten Karanganyar dan kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan informan para pegiat (aktivis) LSM, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah daerah—khususnya Dinas Perhubungan dan Kominfo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan FGD (*focus group discussion*), dan observasi. Penerapan model dilakukan observasi atas aktivitas *citizen journalism* yang dilakukan para aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) kota Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian yang dilakukan adalah: (1) apa saja komponen kunci yang diperlukan untuk membangun literasi informasi publik warga negara dalam rangka monitoring warga atas perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan publik oleh pemerintah daerah; dan (2) bagaimana keterkaitan antar komponen tersebut sehingga membentuk model untuk mengembangkan strategi pendidikan publik yang melekat kebijakan publik. Berdasar temuan di lapangan, dapat diidentifikasi beberapa komponen kunci untuk membangun literasi informasi publik, yaitu: (1) penyediaan informasi publik oleh pemerintah daerah, dan (2) kapasitas warga untuk mengakses, mengkritisi, dan memanfaatkan informasi terkait pelayanan publik di daerah.

Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam hal penyediaan informasi publik oleh institusi pemerintah, ditemukan bahwa

selama tahun 2012 di kabupaten Karanganyar ada 11 SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang melakukan aktivitas penyediaan informasi publik kepada masyarakat. Anggaran yang disediakan untuk aktivitas penyediaan informasi publik itu sebesar Rp. 886.610.500 atau sebesar 0,36% dari total belanja langsung pada tahun 2012. Sebagian terbesar aktivitas yang dilakukan adalah dengan kegiatan sosialisasi informasi publik kepada sejumlah warga masyarakat yang merupakan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat yang terkait dengan SKPD penyelenggara sosialisasi. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi ini bervariasi, antara Rp. 10 juta sampai Rp. 50 juta pertahun.

Di antara SKPD yang ada di kabupaten Karanganyar, hanya Dinas Perhubungan dan Kominfo (Dishubkominfo) yang memanfaatkan media massa cetak maupun elektronik untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Secara aktif SKPD ini memproduksi beberapa program siaran di stasiun radio milik pemerintah daerah (RSPD) dan stasiun televisi lokal. Anggaran yang disediakan untuk keperluan pembuatan program siaran ini mencapai Rp. 98 juta tiap tahun. Selain itu, Dishubkominfo juga menerbitkan majalah *Intanpari* (dengan biaya Rp. 65 juta pertahun) yang didistribusikan ke kantor unit kerja Pemerintah Daerah.

Temuan yang cukup menarik adalah: (1) Adanya anggaran yang cukup besar (Rp. 75 juta) yang dialokasikan untuk membiayai proses transisi RSPD menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio. Namun, sekalipun dana itu dicairkan, sampai sekarang proses perpindahan ke LPP radio tersebut belum terrealisasikan; (2) Alokasi anggaran sebesar Rp. 73 juta pertahun untuk membiayai kegiatan “kerjasama dengan media massa”. Ketika dilakukan penggalan atas kegiatan ini, informan menyatakan bahwa dana itu digunakan untuk memberikan berbagai fasilitas kepada wartawan yang wilayah tugasnya di kabupaten Karanganyar agar agenda pemerintah daerah dapat dipublikasikan di media massa; (3) Anggaran untuk pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sangat

kecil (Rp. 5 juta per tahun), padahal kelompok warga ini dimaksudkan untuk menjadi agen dan jembatan informasi publik antara pemerintah dengan warga masyarakat.

Dilihat dari jumlah indikator, bentuk kegiatan, volume dan frekuensi kegiatan sosialisasi beberapa SKPD di kabupaten Karanganyar pada tahun 2012, nampaknya perlu perhatian ulang pada: (1) cakupan penerima informasi perlu diperluas, karena selama ini hanya terbatas kepada perwakilan warga masyarakat yang diundang ke aktivitas sosialisasi; (2) perlu keragaman media untuk menyebarluaskan informasi sesuai karakteristik kelompok masyarakat, media cetak berupa majalah resmi pemerintah tidak menjangkau warga masyarakat, sebab hanya disebarkan di kantor-kantor pemerintah; (3) adanya ketimpangan alokasi dana dan kegiatan, di mana tekanan sangat besar diberikan kepada pemanfaatan media massa—yang bersifat satu arah dan minim umpan balik; sementara usaha untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang memfasilitasi interaksi dua arah justru tidak mendapat dukungan dana dan aktivitas yang signifikan.

Kapasitas (Tingkat Literasi Informasi Publik) Warga Masyarakat

Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa, informasi publik yang dipahami dan dicari oleh warga masyarakat adalah isu/informasi yang sifatnya praktis dan aplikatif. Yang menarik, warga masyarakat ternyata dapat mengidentifikasi isu-isu yang bersifat nonfisik, di mana hal ini bertentangan dengan label yang selama ini dilekatkan kepada masyarakat bahwa mereka hanya memperhatikan masalah sarana dan prasarana fisik semata. Warga masyarakat banyak mempertanyakan mengenai transparansi informasi publik, utamanya dalam hal keengganan SKPD untuk memberikan informasi yang mereka butuhkan.

Dari segi media penyebaran informasi publik, ditemukan bahwa ada tiga saluran utama di mana warga masyarakat paling banyak memanfaatkan sebagai sumber informasi

publik, yaitu: (1) surat kabar lokal; (2) kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas lapangan terkait dengan SKPD (misalnya guru, petugas penyuluh lapangan atau PPL, penyuluh kesehatan, petugas Posyandu, dan sebagainya); dan (3) forum-forum pertemuan kelompok masyarakat (misalnya rapat RT, pertemuan Posyandu, dan pertemuan kelompok tani). Justru media elektronik (radio dan televisi) serta majalah resmi Pemerintah Daerah bukan menjadi sumber informasi utama. Hal ini tentu saja menjadi sebuah ironi, mengingat anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk aktivitas diseminasi informasi yang justru tidak banyak diakses oleh warga masyarakat.

Dari sisi partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah, ditemukan bahwa tingkat partisipasi itu masih sangat rendah. Mekanisme yang saat ini ada hanyalah kehadiran perwakilan warga masyarakat di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan sampai kabupaten/kota. Namun warga masyarakat menilai forum ini tidak efektif, karena seringkali apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat—dan sudah diartikulasikan di dalam forum tersebut—tidak diakomodasi di dalam program pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait kapasitas warga dalam hubungannya dengan kualitas partisipasi mereka adalah: (1) pemahaman warga akan hak dan kewajiban memperoleh informasi publik dan bagaimana cara mengakses informasi publik secara etis dan bertanggung jawab; (2) pemahaman warga cara memahami informasi publik yang mereka dapatkan; (3) keterampilan warga untuk menuliskan pengalaman mereka terkait informasi pelayanan publik, atau menuangkan gagasan/menyuarakan atas masalah publik mereka, atau mendokumentasikan *common problem* mereka; dan (4) keterampilan mengkomunikasikan gagasan, temuan, dokumentasi atas *common problem* mereka kepada publik dan pengambil kebijakan dengan menggunakan saluran media tulis dan gambar.

Jurnalisme Warga sebagai Model Penguatan Literasi Informasi

Dari identifikasi kebutuhan warga untuk memperkuat daya partisipasinya, dibuatlah sebuah model penguatan kapasitas warga untuk melakukan aktivitas jurnalisme warga (*citizen journalism*). Penguatan kapasitas ini dikemas dalam *workshop* “*Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik berbasis Citizen Journalism*” yang dilaksanakan selama empat kali pertemuan selama bulan Agustus sampai September 2014. *Workshop* ini bertujuan untuk menggarap aspek kognitif, afektif, dan keterampilan warga seputar isu pelayanan publik dan bagaimana artikulasi kepentingan mereka melalui media massa melalui aktivitas jurnalistik (penulisan berita dan jurnalistik foto) seputar pelayanan publik.

Setelah mengikuti *workshop*, peserta mengalami beberapa perubahan dalam aspek-aspek berikut ini: (1) warga mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu pelayanan publik, yang ditunjukkan dengan tulisan esai peserta tentang isu-isu pelayanan publik yang ada di sekitar mereka; (2) warga mampu melakukan kegiatan liputan isu pelayanan publik, dan kemudian mengartikulasikan temuan mereka dalam format berita dan *features*; dan (3) warga mampu merekam isu-isu pelayanan publik dalam format foto jurnalisme, dengan memberikan narasi dan penjelasan atas foto-foto yang mereka hasilkan.

PENUTUP

Kapasitas warga negara untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi pemerintahan mensyaratkan adanya literasi informasi publik, yaitu kemampuan untuk mengakses, memilih, mengkritisi informasi terkait isu-isu publik; dan dilanjutkan dengan kemampuan untuk mengartikulasikan temuan dan gagasan warga menggunakan media massa—mengingat forum-forum yang selama ini ada masih belum efektif untuk menampung partisipasi warga.

Jurnalisme warga (*citizen journalism*) dapat menjadi model alternatif untuk memperkuat kapasitas warga, karena di sana warga akan mengalami pengasahan dalam kemampuan mereka untuk mengidentifikasi isu-isu publik penting yang harus didiskusikan, kemampuan untuk menelusuri dan mencari informasi yang berbasis fakta, dan kemampuan untuk menyampaikan aspirasi warga di dalam format informasi yang mentaati kaidah dan etika jurnalistik, di antaranya: aktual, objektif, dan independen. Pada gilirannya, peningkatan kapasitas warga terkait literasi informasi publik ini diharapkan akan menambah daya ungkit (*leverage*) bagi warga untuk mendorong praktik penyelenggaraan pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan propublik.

DAFTAR PUSTAKA

- ANSA-EAP (2012). *Social accountability perspectives and practices in east asia and the pacific social accountability stocktaking report-Indonesia*. Manila, Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific (ANSA-EAP).
- Banda, F. (2010). *Citizen journalism & democracy in Africa*. Grahamstown, South Africa: Highway Africa.
- Bowman, S.; Willis, C. (2003). *We media: how audiences are shaping the future of news and information*. The Media Center at the American Press Institute.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance, *public administration review*; Dec 2006; 66, ABI/INFORM Global.
- Gerring, J. dan Thacker, S. C. (2004). Political institutions and corruption: the role of unitarism and parliamentarism. *British Journal of Political Science*, 34(2), 295-330.
- Haq, K.et al., (1999). *Human development in south asia 1999 : The crisis of governance*. Oxford: Oxford University Press.
- McGee, R. and Gaventa, J. (2010). *Review of impact and effectiveness of transparency and accountability initiatives: A Synthesis report*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Moyo, D. (2009). Citizen journalism and the parallel market of information in Zimbabwe's 2008 Election. *Journalism Studies* 10(4): 551-567.
- Peruzzotti, E.; Smulovitz, C. (2006). *Social accountability an introduction*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Ungar, Mark. (2009). Democracy, law, and order. *Latin American research review*, 44(3).
- Wahyuningsih, R., Hastjarjo, S., Anshoriyah, F. (2013). Strategi pengembangan *public policy literacy* untuk mendorong kebijakan pembangunan daerah yang propublik (Studi di kabupaten Karanganyar). Unpublished. Surakarta: LPPM Universitas Sebelas Maret.
- Weiss, T. (2000). Governance, good governance and Gglobal governance: Conceptual and actual challenges. *Third world quarterly Journal of Emerging Areas* 21(5).
- Wood, F.A.; Smitt, M.J. (2005). *Online communication*. London. Lawrence Erlbaum Associates.
- Yang, K.; Callahan, K. (2005). Assessing citizen involvement efforts by local government. *Public Performance and Management Review* 29 (2):191-216.
- Zuckerman, E. (2009). Citizen media and the Kenyan electoral crisis. In S. Allan & E. Thorsen (eds.), *Citizen Journalism: Global Perspectives*. New York, NY: Peter Lang.